

PEMAHAMAN (*LEARNING TO KNOW*) KONFLIK DAN Malfungsi AGEN SEBAGAI SUBSTANSI PENDIDIKAN KONFLIK DALAM KASUS KONFLIK PABRIK SEMEN DI REMBANG JAWA TENGAH

¹⁾Sidik Puryanto, ²⁾Ahmad Hariyadi, ³⁾Siti Aniqoh Shofwani

¹⁾Universitas PGRI Ronggolawe Tuban; ²⁾IKIP PGRI Bojonegoro; ³⁾STIE Semarang

¹⁾E-mail: sidikpuryanto@gmail.com

Abstract

A conflict Justification, in the social fact level, has an objective distortion pertaining to the case of a cement factory in Rembang, Central Java. The conflict assuredly needs analytical thinking to avoid misperception. Hence, this research aimed at describing and analyzing the issues. The descriptive qualitative approach was chosen to deepen understanding (*verstehen*). The results of this research reveal that: (1) the conflict between the Rembang cement and PT. Semen Indonesia incorporation are not only the case but are series of conflicts which occur between the community and a small scale mining company or *Galian C* which had previously existed for a long time; (2) Learning to know of conflict is a form of continuous conflict prevention education; (3) the conflict agent must have the actual agent capacity.

Keywords: *conflict fact, conflict understanding, conflict education*

Abstrak

*Justifikasi terhadap konflik dalam ranah fakta sosial memiliki kelemahan objektif dalam menyimak kasus pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Konflik sangat membutuhkan pemikiran secara analitik untuk dapat di pahami agar tidak terjadi mispersepsi dalam menyingkapinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis konflik dalam kasus pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Metode pendekatan penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendalaman kasus agar diperoleh pemahaman yang mendalam (*verstehen*). Hasil penelitian ini adalah: (1) konflik pabrik semen Rembang bukan murni dengan PT. Semen Indonesia Tbk. akan tetapi merupakan rangkaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang skala kecil atau *Galian C* yang sebelumnya sudah ada dan berdiri sejak lama. (1) Pemahaman konflik (*learning to know of conflict*) merupakan salah satu bentuk pendidikan pencegahan konflik berkelanjutan. (2) Agen konflik harus memiliki kapasitas sebagai agen yang sebenarnya.*

Kata Kunci : *fakta konflik, pemahaman konflik, pendidikan konflik*

Setiap kegiatan pertambangan skala besar selalu menimbulkan konflik antara masyarakat lokal yang menolak dengan pihak pihak yang mendukung, karena terjadi mispersepsi dari masing masing aktor. (*perceived divergence of interest*). Pruitt & Rubbin (2009), konflik adalah

persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak pihak konflik tidak dapat tercapai secara simultan. Persepsi di antara pihak pihak konflik tidak sinkron, saling bertolak belakang, dan atau saling tidak mau menerima aspirasi dari

pihak lain, dan masing masing pihak tetap bersikukuh dengan pandangan yang saling membenarkan satu sama lain. Bentuk konflik pun berkembang, dari tertutup menjadi lebih terbuka, saling serang, dan saling melakukan *feed back*. Meskipun konflik tertutup namun kadang efeknya jauh lebih berbahaya dan jauh lebih radikal di dibandingkan jika sejak awal sudah melakukan konflik terbuka, dikarenakan konflik tertutup lebih menyembunyikan apa yang menjadi tuntutan sejak dari awal dan biasanya mengarah pada prinsip dan nilai, dan jika hal itu sudah terjadi maka konflik akan semakin sulit untuk di carikan solusi, dan di pastikan akan sangat lama (Lewis Coser : 1956).

Konflik pertambangan seringkali tidak di dahului dengan memahami kondisi lingkungan sosial budaya setempat, dan seringkali konflik mengalami keterlambatan (*kasep*) dalam menyingkapi apalagi dalam upaya menemukan solusi. Penyelesaian yang kerap kali di lakukan cenderung menciptakan kekuasaan kebudayaan hanya dalam konteks ekonomi. Dominasi mengatasnamakan negara dengan berdalih sebagai pusat kewenangan dalam membuat kebijakan dan memasang target atau hasil maksimal yang harus di peroleh dari setiap proses kegiatan menjadi arena otoritarianisme dari ibarat sebuah negara kecil dengan otonomi kedaerahan. Persoalan konflik bukan menjadi surut namun semakin meningkat, karena banyak persoalan yang bertolak belakang, bersinggungan dan bertentangan dengan masyarakat bawah (*grassroot*) yang selalu menjadi korban dinamika konflik yang semakin berkembang.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang selama ini menjadi kiblat atau arah pembangunan yang sebenarnya belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam hal pencapaiannya, terutama bagi masyarakat bawah (*grassroot*). Masyarakat seolah di pinggirkan (*deprivacy*), di asingkan dalam kebijakan pembangunan *top down*. Kebijakan sentralisasi dari pusat, dan mau tidak mau bagi yang di bawah harus melakukan. Konsep lain dari pembangunan adalah masih cenderung dominan mengarah kepada konsep pertumbuhan ekonomi, sebagai *the goal achievement* atau tingkat capaian ekonomi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, dan meskipun paradigma teori sudah mengkritisi, namun dalam faktanya paradigma

ekonomi murni masih menjadi dominan, (Soetomo :2006, Usman :2006). Konsep pembangunan harusnya juga belajar memahami sejarah, sebagaimana penelitian Kartodirdjo (1984) dalam *Pemberontakan Petani Di Banten* menemukan bahwa gerakan petani tidak lagi harus di pahami akibat dari faktor ekonomi semata, namun harus di lihat dalam ranah lain, seperti sosial dan budaya yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai.

Kinerja ekonomi dengan angka pertumbuhan ekonomi 6-6,5 persen per tahun, disamping tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prasetyantoko et.al, 2012), juga tidak diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, kepentingan maksimalisasi pertumbuhan ekonomi lebih dominan daripada upaya perlindungan lingkungan hidup, meskipun wacana tentang pembangunan berkelanjutan terus berkembang dan diagendakan dalam praktik pembangunan di seluruh negara di dunia (Suharko, 2004).

Pembangunan memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan. Pembangunan dalam era klasik dengan pendidikan adalah aktifitas atau kegiatan yang di paksakan. Sama sama Kebijakan sentralisasi yang di buat dengan tujuan peningkatan pada hasil (*goal achievements*). Pada kasus konflik Freeport di Papua, dan kasus konflik yang lain mengintrepretasikan pembangunan adalah keharusan dan mau tidak mau masyarakat harus mau menerima. Bagi masyarakat sekarang yang sangat kontradiktif, dan memiliki pemikiran kritis dengan menentang kebijakan sepihak dari pemerintah yang justru bukan keberhasilan dari tujuan yang di sebutkan, namun dampak yang di timbulkan tidak sepadan dengan apa yang di terima oleh masyarakat. (Manalu Dimpos, 2006, Silaen Victor, 2003).

Kegagalan dalam memahami akar konflik menimbulkan konflik sulit terselesaikan, negosiasi tidak akan berjalan dengan maksimal, dan yang ada hanya langkah langkah represif dalam setiap proses pemecahannya. Kegagalan mengelola konflik yang terjadi di wilayah negeri ini, salah satu faktor utama dan menentukan adalah tidak memahaminya pemangku kebijakan dan rekan kapitalisme tentang latar belakang dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Ngadisah (2003) menemukan bahwa konflik pada

perusahaan pertambangan PT. Freeport diawali dengan adanya konflik antar suku yang sudah menjadi tradisi budaya masyarakat di Papua yang tidak dipahami oleh pemangku kebijakan. Bagi masyarakat Papua konflik merupakan cermin kehidupan sehari-hari, dan sangat inheren dalam kelompok kesukuan. Bentuk konflik sangat terbuka dan sangat radikal, karena sangat erat dengan ikatan nilai-nilai budaya primordial mereka.

Tindakan pemahaman (*knowing*) adalah tahapan awal dari mekanisme konsep pendidikan, sebagaimana dasar pendidikan yang dijabarkan UNESCO. Pemahaman disebut juga sebagai faktor stimulus atau potensi yang sangat menentukan bagaimana merencanakan sebuah tindakan. Pemahaman memiliki makna dari awal tindakan sosial, sedangkan tindakan adaptasi yang merupakan substansi dari sosial. Sosial adalah unsur utama dari stimulus yang kemudian sangat menentukan tindakan respon, karena sosial menentukan apakah terjadi asosiasi maupun disosiasi.

Sultz menekankan bahwa sebelum terjadinya tindakan sosial (*social action*) diawali oleh sebab-sebab tindakan (*how to motive*). Konflik sangat tidak mungkin dilihat hanya dalam konteks objektifitas dalam fakta atau fenomena, namun harus didasari subjektifitas secara mendalam, bahwa ada substansi yang harus digali lebih jauh tentang konsep-konsep fakta atau setiap aktifitas yang terjadi.

Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa agar mendapatkan sebuah tindakan yang tepat maka sebab-sebab atau latar belakang yang mendasari tindakan tersebut harus dengan sangat dipahami, sehingga proses sosial bisa bergerak menjadi asimilasi, dan akulturasi. Tindakan pembangunan bukan hanya melalui cenderung membentuk fisik (materiil), namun sisi humanisasi atau sisi non materiil, nilai dan norma harus menjadi prioritas utama. Maka, untuk memahami pembangunan agar berkelanjutan, prioritas utama adalah memahami konsep latar belakang atau riwayat.

Pemahaman konflik atau proses memahami konflik (*learning to know*) memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemahaman pemetaan konflik (*conflict mapping*) yang dikemukakan oleh Wehr dan Bartos. Wehr dan Bartos dalam Susan (2009),

memberikan teknik pemetaan konflik, yaitu *specify the context* (konteks konflik), *identify of parties* (aktor konflik), *separate cause from consequences* (sebab-sebab konflik), *separate goal of interest* (tujuan konflik), *understand of dynamic* (dinamika konflik), *search for positive function*, *understand for regulation potential*.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kawasan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah, tepatnya di lingkungan Pegunungan Watuputih, yang letaknya didekat Desa Tegaldowo, Desa Pasucen, Desa Timbrangan, dan Desa Kajar. Penelitian kasus konflik pabrik semen Rembang menggunakan pendekatan kualitatif, analisa data deksriptif, dengan menjelaskan data kualitatif yang diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara yang mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari data yang terdapat dari media baik koran, majalah, dan media *on line*. Sebelum menentukan hipotesa data terlebih dahulu di analisis tentang keabsahan data dengan validitas dan reliabilitas data, dengan triangulasi data, teknik, dan sumber. Data yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian dipilih yang relevan dengan penelitian, yang menjadi bahan kesimpulan kemudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Konteks Konflik

Desa Tegaldowo memiliki luas area yang bisa disebut salah satu Desa terbesar di wilayah Kabupaten Rembang, dengan luas lahan 1.629 ha, dengan pembagian lahan sawah 104, dan lahan bukan sawah 1524. Lahan seluas itu merupakan lahan tadah hujan, dengan estimasi curah hujan 2000 mm/pertahun. Lahan bukan sawah didominasi oleh daerah pegunungan Watuputih, yang berada di sebelah selatan desa. Banyak orang melihat sebagai lahan kering, namun tidak bagi warga sekitar. Karena pertanian jagung sangat tumbuh subur pada musim sekarang, dan petani rata-rata memanen dua kali dalam setahun.

Sepanjang 3 km, Pegunungan Watuputih terbentang dari sisi barat ke timur, disisi sebelah

timur Pegunungan Botak, yang mengelilingi dan merupakan batas Desa di wilayah Tegaldowo, Suntri, dan Dowan. Pegunungan Watuputih juga memisahkan Desa di bagian selatan yang sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Blora, dibagian sebelah timur masuk wilayah Kecamatan Sale.

Pegunungan Watuputih menjadi *geger* sejak tahun 2012 hingga sekarang, disebabkan oleh masuknya pabrik semen Gresik, kemudian berubah menjadi Semen Indonesia Tbk. *Geger* Watuputih menjadi perhatian nasional, dan internasional, karena merupakan efek domino dari kejadian di Pati beberapa waktu yang lalu. Pegunungan Watuputih kaya batu kapur, yang jika dilihat secara awam memang terlihat Nampak warna putih batuan kapur, meskipun demikian sebagian masyarakat memperoleh hasil pertanian yang melimpah dari batuan kapur Watuputih.

Hasil yang didapat dari hasil tanaman jagung sangat melimpah, dan bagi masyarakat Tegaldowo dijadikan tanaman komoditas primer, selain padi. Estimasi hasil panen dari tanaman jagung per hektar mencapai sekitar lima sampai tujuh ton. Jika selama musim tanam bisa tiga kali panen, kalkulasi hasil jagung yang di peroleh adalah sekitar duapuluh ton per tahun.

Hasil yang diperoleh masyarakat Desa Tegaldowo bertambah berlipat, selain menggarap tegalan milik sendiri, mereka kebanyakan menyewa lahan persilan. Semakin luas lahan persilan yang disewa, makin menambah pendapatan yang masuk ke kantong mereka. Terkenal dengan sebutan masyarakat peramu, ahli dalam bertani, sebagian masyarakatnya selalu mencari lahan persilan hingga ke pelosok diluar desa. Jangkauan penyebaran dalam mencari lahan persilan baru hingga ke lain kecamatan, bahkan sudah menjangkau wilayah lain kabupaten.

Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tuban menjadi pangkalan lahan berikutnya. Bagi masyarakat yang sudah terbiasa hidup bertani dan mengandalkan kehidupan mereka dari hasil pertanian, memang sudah menjadi keharusan. Sebagai ciri dari *sosial animal*, yang harus mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Kebanyakan petani yang memiliki jiwa, prinsip hidup, budaya petani seringkali harus melawan pada hal hal yang di anggap bertentangan dengan jiwa mereka. Karena mereka sudah menganggap,

apa yang menjadi budayanya paling benar. Kebanyakan mereka menolak jika harus merubah apa yang telah menjadi prinsip hidup mereka.

Persilan dari Kecamatan Pamotan, dan Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang juga menjadi target dari sebagian masyarakat Tegaldowo untuk memenuhi pertanian mereka. Bahkan beberapa orang bertempat tinggal di lahan persilan mereka, hingga proses pembubakan sampai penanaman selesai, dan tak jarang yang tinggal hingga musim panen tiba. Desa Tegaldowo dan Pegunungan Watuputih, Pegunungan Botak memiliki hubungan sangat erat. Nampak keakraban sejarah ada dalam diri mereka. Bertiganya saling membutuhkan satu sama lain (*simbiosis mutualism*).

Desa Tegaldowo, bisa dicapai dari dua arah. Jalur yang pertama bisa dilalui dari Kecamatan Gunem dengan radius sekitar 12 km. Kondisi jalan beraspal, dan cukup bagus, kadang naik, kadang turun menukik. Terdapat dua kelokan yang sangat tajam, disamping kiri kanan jurang yang cukup lumayan dalam. Sebelum mencapai Desa Tegaldowo, terlebih dahulu melewati Desa Dowan, dan Desa Suntri. Nampak disamping kiri, hijau pepohonan yang terlihat dipegunungan Botak, kemudian di sisi kanan Nampak jauh panorama dibawah yang indah. Dapat dilihat bangunan pabrik semen, dan perumahan penduduk desa dibawah.

Sejuk dan pemandangan yang indah, kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan tidak bisa diukur dengan ekonomi, keindahan sangat berkaitan dengan kesenian, kenyamanan. Keseimbangan ekologi pertanian tumbuh dari sejarah masa lalu menuju sejarah modern. Keseimbangan terusik dengan hadirnya pabrik semen di Gunem Rembang.

Kenyamanan tidak bisa di ukur dengan harta berlimpah, uang banyak, namun kenyamanan hanya dapat di ukur dengan kerelaan hati, kerendahan hati. Bagi yang berpihak pada konservatif, kenyamanan adalah *absolute*, dan tidak bisa dibeli atau digadai dengan apapun. Jalur yang kedua, bisa dilalui dari arah barat, yang menghubungkan dengan Kecamatan Bulu, Kecamatan Sulang, hingga ke Kabupaten Kota Rembang pada jalan Blora. Sebalah barat Desa Tegaldowo ada Desa Timbrangan, dan Desa Pasucen, sebelah selatan ada Desa Kajar.

Desa Tegaldowo sangat dekat dengan Pegunungan Watuputih, letaknya persis dibelakang perumahan penduduk. Saking dekatnya, masyarakat memiliki ikatan sangat erat, mereka berpikir jika gunung rata dengan tanah, akibat dampak pabrik semen, apa yang bakalan terjadi. Sejarah pegunungan watuputih akan menjadi sejarah yang tidak bermakna. Hilangnya pegunungan watuputih bakalan disebut hilangnya ciri Desa Tegaldowo, yang selama ini memiliki kaitan sejarah yang kuat.

Menjulung tinggi sekitar 15 meter, bagaikan paku bumi di sisi selatan, di satu sisi Gunung Botak. Kekuatan alam yang mengagumkan. Kekuatan alam yang bernasib tragis, karena mesin mesin kapitalis mengeruk sumber daya alam demi keuntungan berlimpah. Alienasi, keterpurukan, ketidakadilan menjadi stigma baru yang akan muncul diperadaban baru, peradaban yang memihak pada kehancuran alam dan menggantikannya dengan setitik madu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu.

Desa Tegaldowo terbagi dalam enam dukuhan, yang masing masing dukuhan dipimpin oleh kepala dukuh (*kamituwo*). Yaitu Dukuh Ngablak, Dukuh Nduko, Dukuh Tegaldowo, Dukuh Ngeluh, Dukuh Ngrecong, dan Dukuh Karanganyar. Masing masing dukuhan mempunyai pimpinan dukuh atau kadus, yang tugas pokoknya adalah mengelola, menjaga masing masing wilayahnya dibawah struktur tertinggi desa yaitu Kepala Desa. Dukuh Tegaldowo merupakan dukuh *krajan* dari Desa Tegaldowo, atau disebut Dukuh Krajan karena memiliki arti penting menurut sejarah desa. Disebut *cikal bakal* Desa Tegaldowo berasal dari Dukuh Tegaldowo. Dukuh Tegaldowo berada di tengah tengah desa, diapit oleh Dukuh Ngablak, Dukuh Nduko, dan Dukuh Karanganyar.

Dukuh Tegaldowo tepat berada di kaki Pegunungan Watuputih, yang terlihat pada saat ini, tanaman jagung menghijau tinggi, nampak tegalan *terassering*, bagaikan piramida hijau, berderet dari satu ujung ke ujung yang lain, mencerminkan kehidupan melimpah dilahan yang kering, tapi bukan di lahan yang tandus. Limpahan hasil alam yang tiada pernah habis termakan usia, dan bisa diwariskan kepada anak cucu dan turunannya.

Desa Tegaldowo menjadi kisruh sesaat setelah masuknya pabrik semen PT. Semen

Indonesia Tbk. yang awalnya PT. Semen Gresik Tbk. yang berubah kisaran antara tahun 2011, setelah gagalnya eksploitasi di wilayah Pati (Suharko, 2013; Suharko, 2016). Benturan kebijakan pemerintah antara Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 poin menyatakan bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B, yaitu CAT yang berada di lintasan antar Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Perda No.6 Tahun 2010 di perkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang RT/RW Nasional, dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Rembang secara jelas mengatakan Cekungan Air Tanah (CAT) Pegunungan Watuputih termasuk kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juni 2012, dengan dasar dari Permen ESDM No 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, yang meliputi Karst Sukolilo yang menghubungkan wilayah Grobogan, Pati, dan Blora, Karst Gombong di wilayah Kebumen, dan Karst Pegunungan Sewu meliputi wilayah Wonogiri dan Pacitan.

“Lokasi kegiatan penambangan PT. Semen Indonesia Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tidak berada di kawasan yang di lindungi”. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. (Kompas, 26 Februari 2015). “Setelah ada penelitian bawah tanah dari dinas ESDM tidak di temukan bukti ponor yang dimaksud oleh Walhi bahwa di Kawasan Pegunungan Watuputih terdapat 22 ponor yang terhubung dalam lapisan tanah karst yang mengandung sumber mata air. Tim juga tidak menemukan satupun goa bawah tanah yang di klaim berada di bawah lahan eksplorasi pabrik semen”.

Konflik perbedaan pandangan dalam penyusunan AMDAL menjadi sumber konflik selanjutnya. Menurut pandangan masyarakat bahwa dalam proses penyusunan dan isi beberapa konsep di anggap memiliki kerancuan karena berbeda dengan fakta. Pembuatan amdal dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar objek

dengan sebelumnya melalui mekanisme pengumuman (sosialisasi) dan konsultasi publik. Keluhan masyarakat yang selama ini terjadi adalah sebagian beranggapan bahwa kajian amdal tidak pernah melibatkan masyarakat, dan jika itu terjadi masyarakat yang mana. Sebagian masyarakat daerah dampak lingkungan merasa mereka tidak di berikan informasi terkait dengan sosialisasi amdal, apalagi dalam konsultasi publik.

Pandangan lain di berikan dari pihak advokasi PT. Semen Indonesia Tbk. mengenai saat proses pembuatan amdal, baik analisis maupun pengelolaannya terhadap lingkungan masyarakat diikutsertakan saat proses pembuatannya. Perbedaan awal pandangan tentang pro dan kontra keterlibatan masyarakat dalam menyusun amdal, berdampak pada bagaimana isi dalam dokumen amdal, dan menurut masyarakat pro gerakan, bahwa beberapa fakta dalam dokumen amdal tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa fakta yang dianggap masyarakat berbeda adalah persoalan adanya gua bawah tanah, dan *ponor*, bahkan seorang tokoh penggerak mengatakan bahwa selama ini dari pihak pabrik semen tidak berani untuk mengecek secara bersama sama apakah fakta itu benar atau tidak, dan meskipun dari awal bersama sama namun dalam proses berjalannya pihak pabrik semen bersinggungan.

Akar Konflik

Konflik masyarakat lokal dengan PT. Semen Indonesia, yang terjadi di Desa Tegaldowo dan sekitarnya merupakan rentetan konflik yang sebelumnya sudah ada, dari sejak berdirinya tambang skala kecil atau Galian C, yang sudah ada sejak tahun 1996. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan masa itu sudah terjadi sejak praktek jual beli lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang berjalan dengan tidak fair. Sejak masa itu, masyarakat mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang kurang mengesankan, atas perilaku perilaku yang kurang baik dilakukan oleh kelompok kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pendukung perusahaan tambang.

Masyarakat desa yang cenderung lebih memilih aman, kebanyakan tidak melakukan pilihan perlawanan. Mereka lebih memilih tindakan pasrah (*skeptis*), dan menyerahkan kepada takdir mereka. Bukan berarti mereka

takut pada perang, namun mereka lebih memilih menghormati budaya untuk mengalah, karena yang dinamakan musuh bukanlah orang yang saling kenal sudah sejak lama, saling membantu jika ada kesulitan, dan saling gotong royong. Selain budaya mengalah sebagai wong cilik, hubungan patron klien menjadi peran utama dalam setiap kasus yang terjadi. Nilai nilai stratifikasi sosial masih sangat tinggi terhadap lembaga lembaga superordinasi, yang didominasi oleh komponen pemerintahan desa dan didukung oleh lembaga di atasnya. Masuknya aparat keamanan baik TNI POLRI dalam kelompok tersebut menambah kekuatan yang menciptakan peran atas ketidakberanian masyarakat sekitar dalam melakukan perlawanan.

Sejarah kekuatan militer memiliki peran pada setiap kegiatan tidak lepas dari peran pemerintahan zaman Soeharto. Dengan kekuatan besi, menggunakan peran aparat militer sengaja dilakukan untuk mendukung setiap langkah langkah dalam rangka mempercepat pembangunan nasional. Rezim Orba memang memiliki peran dalam memainkan sejarah pembangunan nasional. Dengan orientasi pada peningkatan ekonomi, mau tidak mau segala cara harus dilakukan demi terwujudnya tujuan tersebut. Bagaimana Orba memainkan depolitisasi untuk menekan setiap gerakan yang tidak mendukung, dan bahkan tindakan represif akan dilakukan untuk memuluskan apa yang menjadi tujuannya.

Meskipun dalam berbagai persoalan pembangunan selalu menggunakan tindakan militer, dan cenderung represif, namun beberapa keuntungan dari perubahan pembangunan bisa terlihat hingga saat ini. Pembangunan percepatan nasional patut mendapat apresiasi yang maksimal oleh generasi masa kini dan mendatang. Apa yang bisa dinikmati sekarang tidak lain adalah hasil karya rezim Soeharto. Bisa dibayangkan jika kehidupan pembangunan masa itu sangat didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia yang memadai, tentunya Negara ini akan jauh di depan dan setingkat Negara Jepang, China atau Negara maju lainnya

Satu kesalahan yang harus menjadi catatan bagi pembangunan ekonomi Orba, adalah ketidak seimbangan perencanaan pembangunan tidak didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bayang bayang imperialism

memberikan efek *inlander*, masih berasa hingga saat itu. Masyarakat pribumi identik masyarakat *ngisoran*, terbelakang dan bodoh, akibat dari lamanya penjajahan, Negara yang kenyang akan sejarah penjajahan, tidak menjadi daya ingat bagi rezim orba untuk mengubah revolusioner dengan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh kalangan pribumi. Rezim orba tidak pernah belajar dari Jepang, dengan mementingkan kualitas pendidikan manusia ketimbang pembangunan ekonominya.

Ketakutan masyarakat akibat dari efek sindrom militerianisme zaman orba sangat kerasa hingga saat ini dengan tidak adanya perlawanan, protes bahkan gerakan radikal yang sudah semestinya perlu dilakukan. Perlakuan intimidasi, pembohongan, pembodohan yang dilakukan oleh kelompok kelompok tertentu yang mementingkan keuntungan pribadi sekiranya menjadi pemicu konflik yang terjadi sekarang ini. Beberapa kejadian atau kasus yang menjadi rangkaian rentetan konflik yang sebelumnya sudah ada, terbagi dalam beberapa subbab dibawah ini, dengan klasifikasi konflik menurut motif, dan beberapa pertentangan yang dikaitkan dengan konflik sebelum datangnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk.

Konflik Pembebasan Lahan

Sejak munculnya tambang di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, sekitar tahun 1996, berbagai persoalan muncul terkait dengan pembebasan lahan dari para petani. Petani yang merasa memiliki tanah yang didapatkan secara turun temurun (*warisan dari kakek buyut*) dan memang kebanyakan tidak memiliki surat sah yang membuktikan kepemilikan tanah yang sah atau *sertifikat*, dijadikan modus oleh oknum tertentu agar mendapatkan keuntungan dengan cara cara yang kurang baik. Kesadaran mereka tergugah setelah adanya kisruh tanah yang terjadi sekarang ini. Pemikiran mereka seakan sudah terbuka, akan pentingnya sertifikat yang harus dipunyai, untuk menandakan kepemilikan yang sah akan tanah yang dimilikinya. Karena selama ini masyarakat hanya tahu bahwa surat pajak (SPPT) sudah sah sebagai pemilik tanah.

Kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak penambang atau oknum yang memanfaatkan perusahaan tambang

terhadap tanah yang dimiliki masyarakat Desa Tegaldowo terjadi jauh sebelum pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. datang. Kasus kasus tersebut masih banyak yang belum terselesaikan sama sekali, dan bahkan hingga saat ini kasus tersebut seolah hilang ditelan bumi. Beberapa petani yang merasa tanah yang mereka miliki berkurang, dikarenakan terkena rembetan pembuatan jalan atau pelebaran jalan menuju lokasi tambang. Oknum penambang telah melakukan tindakan dengan mengelabui petani yang memiliki hak sah atas tanah tersebut, yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada mereka. Karena dianggap perbuatan itu menjadi kerugian bagi dirinya, mereka mengadu kepada pemerintahan desa. Namun yang didapat bukannya hal yang diharapkan, kebenaran dan keadilan, justru malah seakan ada permainan dan seolah sudah direncanakan sebelumnya. Maka untuk menghindari hal hal yang negatif, demi kebaikan kenyamanan mereka, yang merencanakan hanya pasrah, dan menyimpan persoalan ini.

Selain hilang karena penyerobotan yang dilakukan pihak penambang, kasus hilangnya lahan petani juga disebabkan oleh ulah oknum yang berwenang dalam merubah surat pajak (SPPT), sebagai kesengajaan dalam prosedur dengan tujuan menghilangkan sebagian lahan petani. Oknum oknum sengaja membentuk kelompok yang terorganisir satu sama lainnya, seperti halnya komplotan dalam menyusun strateginya untuk kebaikan kelompoknya sendiri. Dalam kasus hilangnya tanah dengan modus kesengajaan dalam merubah surat pajak banyak terjadi, namun karena skeptis dari masyarakat desa, untuk memilih tindakan subsistensi, maka mereka sengaja membiarkannya. "*Urip wis ono sing ngatur*" seringkali menjadi dasar bagi masyarakat primordial dalam menghadapi segala bentuk kejadian dalam kehidupan.

Kasus penipuan dalam jual beli lahan banyak terjadi antara petani dengan perantara. Dengan keberadaan tambang sengaja dimanfaatkan oleh perantara untuk mengambil keuntungan dalam proses jual beli tanah dari masyarakat Desa Tegaldowo. Banyak perantara yang saling bekerjasama satu sama lainnya untuk saling sama sama mendapatkan keuntungan secara bersama sama pula. Dan bahkan sering terjadi dalam satu proses jual beli terdapat

beberapa perantara, tangan pertama, tangan kedua, dan bahkan ada tangan tangan selanjutnya.

Masyarakat desa pada umumnya tidak saja tidak suka dengan hal yang rumitkan, tetapi juga membingungkan, karena terlalu banyak campurtangan dari para makelar yang sengaja mengkondisikan seperti itu. Kondisi tersebut sengaja dimanfaatkan oleh perantara untuk semakin membingungkan masyarakat, agar semakin mudah melakukan tindakan tindakan yang kurang benar. Kebanyakan kasus penipuan jual beli lahan berasal dari banyaknya perantara tidak bertanggung jawab yang ikut nimbrung dalam proses tersebut. Beberapa kasus yang dialami oleh beberapa masyarakat akibat dari perantara adalah ketidakjelasan kapan pelunasannya, penggelapan dilakukan oleh perantara dikarenakan personal meninggal, penipuan atas jual beli tanah petani tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya tanah yang dijual setengah, namun kenyataannya seolah telah dijual keseluruhan. Perilaku oknum makelar tanah yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai *agent* dalam membantu pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. justru berbalik arah menyerang balik dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, menimbulkan aktor konflik semakin bertambah, dan akumulasi konflik makin meningkat.

Konflik dengan Kelompok Luar

Perilaku tidak menyenangkan oleh kelompok kelompok yang berlindung dibalik tambang telah disinggung sedikit, bahwa pada dasarnya untuk mewujudkan tujuannya yaitu memperoleh keuntungan ekonomi semata, perilaku perilaku tidak etis sering dilakukan oleh mereka. Selain melakukan upaya penipuan, penggelapan, dan bahkan mekanisme prosedur yang nyata nyata salah, ada upaya lain yang dilakukan, yaitu melakukan intimidasi, bahkan ancaman secara simbolik kepada masyarakat secara terang terangan. Seperti contoh, ungkapan verbal “*ngko nek ora mbok dol tanahmu bakalan ilang*”, ungkapan tersebut memberikan makna ancaman, jika tanahmu tidak dijual, maka dipastikan akan hilang.

Perilaku perilaku tersebut masing sering ditampakkan hingga saat ini. Contoh kasus yang terjadi saat ini adalah perilaku sewenang wenang atas masyarakat dengan tetap menyerobot tanah

meskipun sang pemilik tetap berjuang keras untuk mempertahankannya. Kejadian menyerobot tanah tersebut sudah seringkali dilakukan, namun perilaku tersebut seolah tidak pernah berhenti. Beberapa masyarakat sependapat, bahwa konflik semakin berlanjut jika orang orang yang di atas hanya percaya kepada mereka, bukannya terjun langsung kebawah melihat keadaan yang sebenarnya. Masyarakat menyadari bahwa tidak bisa menolak tambang, namun proses yang dilalui harusnya penuh dengan kejujuran, kebaikan dan bukan kearah sebaliknya.

Perilaku perilaku yang dilakukan oleh pamong yang menciptakan banyak persoalan yang semakin menumpuk menimbulkan rasa kecewa, rasa benci, dan berubah menjadi aras yang menimbulkan eskalasi konflik dikemudian hari. Perilaku lain yang menimbulkan kebencian, yang harusnya menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai elemen pemerintahan desa adalah memberikan informasi yang jelas dalam setiap komplain dari masyarakat, namun realitasnya adalah justru masyarakat diberikan sebuah *a game* yang muter dan berbelit belit, dan hal itu terus saja berulang sedemikian rupa, sehingga kemudian dari masyarakat merasa malas dan enggan untuk bertanya tentang apa yang menjadi hak mereka. Seperti contoh, misalkan dari seorang masyarakat yang menanyakan soal tanah yang hilang, kepada seorang perangkat, jawaban yang diterima menjadi beralih ke orang lain, kemudian nanya lagi ke orang ke dua, jawabannya menjadi ke orang ketiga, dan begitu seterusnya. Linglung masyarakat terhadap apa yang menjadi respon mereka, menjadikan keputusan akan apa yang selama ini dipertanyakan dengan maksud mencari jawaban yang jelas dan benar, namun justru persoalan semakin berbelit belit, dan masyarakat tidak tahu harus kemana lagi, seolah tidak menemukan tempat untuk bertanya.

Konflik Politik Pilkades

Perhelatan pilkades diakhir tahun 2014 lalu, sekitar bulan November, memberikan pemahaman baru terkait dengan konflik yang pada masa itu masih hangat hangatnya di masyarakat Desa Tegaldowo. Paling tidak masyarakat yang tergabung kedalam kelompok kontra tetap harus memberikan pilihan untuk memilih calon kepala desa enam tahun kedepan. Sejenak melupakan kisruh pabrik semen,

bergembira dalam suasana kemeriahan pilkades pada masa itu. Baik masyarakat pro maupun kontra saling melupakan peristiwa peristiwa yang menimbulkan kerenggangan di antara mereka. Seolah menjadi obat meski hanya beberapa hari saja.

Pada kesempatan yang sama, disebut oleh informan bahwa, pada saat pencalonan kepala desa pada saat itu, kepala desa sekarang pernah berjanji untuk mendukung gerakan dalam melawan pabrik semen. Namun setelah pesta demokrasi selesai, dan menjadi pemenang janji janji yang diucapkan seolah sirna hilang entah kemana. Seperti yang disampaikan kepala desa sekarang pada masa itu “*nek aku dadi ora bakalan ono pabrik semen*” tapi setelah jadi jawaban menjadi berbeda “*jaman kuwi ancen politik*”.

Masyarakat seolah hanya menjadi alat politik untuk mencapai kekuasaan, dan tentu saja banyak yang merasa kecewa dengan hal tersebut. Meski begitu masyarakat kontra tambang sudah bisa melupakan hal hal semacam itu, namun tetap menjadi catatan dalam diri mereka, dan menjadikan pengalaman berharga untuk waspada dikemudian hari. Perhelatan politik pilkades menimbulkan perpecahan di dalam tubuh masyarakat yang kontra terhadap pabrik semen, ditimbulkan pengaruh dari masing masing pasangan calon yang berusaha memperoleh suara dengan berbagai cara untuk menang. Setelah proses pilkades selesai, perhatian masyarakat tertuju pada kepentingan calon kepala desa yang di usungnya, seperti harga diri, menyembunyikan diri dari interaksi, bahkan dampak yang ditimbulkan dari pilkades terhadap kelangsungan integrasi mekanik yang selama ini dibangun seakan menjadi pudar.

Campur Tangan Pendatang

Kelompok pendatang telah disinggung sebelumnya sebagai kelompok yang sudah lama bertempat tinggal dan menjadi anggota tetap masyarakat Desa Tegaldowo. Sejak munculnya perusahaan tambang, semakin banyak pendatang yang masuk ke wilayah desa, dan menjadi kebiasaan membawa budaya baru kedalam masyarakat. Kelompok pendatang pada umumnya adalah kelompok yang sudah memiliki pemikiran terbuka, tidak kolot, menerima setiap perubahan yang berbeda dengan masyarakat asli

Desa Tegaldowo, yang masih sulit menerima perubahan secara kompleks. Bahkan masyarakat asli sangat menolak keras budaya pendatang yang bisa disebut budaya negatif. Budaya negatif yang tidak disenangi oleh masyarakat asli adalah praktek minuman keras. Sejak kelompok pendatang masuk, budaya minuman keras semakin meledak, dan melanda para pemuda-pemuda desa.

Kelompok pendatang tipe ini kemudian bergabung dengan kelompok kelompok lain yang pro dengan pertambangan, membentuk koloni baru dan makin kuat, makin beringas karena setiap ada kasus yang menjadi algojo adalah mereka yang disebut preman yang terlebih dahulu minum minuman keras dalam setiap akan melakukan tindakan. Perilaku campurtangan pendatang dalam berbeda pendapat dengan masyarakat yang kontra dibuktikan dari beberapa pendatang yang selalu ikut mendukung kegiatan pro tambang.

Pabrik Semen PT. Semen Indonesia Tbk. sebagai Konflik Baru

Hadirnya pabrik semen skala besar yaitu PT. semen Indonesia Tbk, menimbulkan beberapa pandangan negatif bagi sebagian masyarakat yang selama ini telah mengalami berbagai perlakuan, tindakan yang tidak mengenakan dari kasus kasus perusahaan tambang sebelumnya. Seolah menemukan kesempatan baru, untuk dapat mengekspresikan apa yang selama ini mereka rasakan, yang selama ini mereka simpan dan makin menumpuk. Luapan amarah, benci, dendam, terhadap oknum masa lalu menjadi alasan pokok dalam setiap kegiatan protes yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pabrik tambang. Apalagi praktek praktek tindakan tidak mengenakan itu terjadi di era pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk saat ini. Bagi oknum yang telah menjalankan peran sebelumnya, dengan hadirnya PT. Semen Indonesia Tbk, pundi pundi uang juga akan semakin banyak, jika mendapatkan objek tanah yang empuk.

Harga tanah semakin mahal dari yang sebelum PT. Semen Indonesia Tbk. datang. Harga tanah dari awal sebelumnya datang pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. kisaran dibawah seratus ribu / meter menjadi dua kali lipat, bahkan beberapa tempat bisa tiga kali lipat. Maka tidak heran jika beberapa masyarakat

seperti ketiban rezeki nomplok. Beberapa orang masyarakat menerima milyaran rupiah dari hasil jual beli tanah. Dan tentu saja bagi makelar, uang cibika cibiki menjadi sumber penghasilan baru bagi mereka, dan hasilnya sangat lumayan. Dengan kata lain, demi keuntungan yang sangat menggiurkan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa praktik praktik kecurangan kerap kali terjadi, antara pihak makelar dengan pemilik tanah, dan bukan dengan pihak PT. Semen Indonesia Tbk. (bukan berarti didalam internal PT. Semen Indonesia Tbk. sendiri tidak ada oknum).

Jika dicerna dari berbagai pendapat masyarakat, disimpulkan bahwa sesungguhnya kebanyakan masyarakat menerima dengan keberadaan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. namun karena *agent* yang membawa kebudayaan baru tidak memiliki kapasitas dan kemampuan sebagai layaknya *agent*, maka yang terjadi adalah apa yang menjadi substansi nilai tidak bisa berjalan, dan meski berjalan tidak berada dalam proses yang benar. Dan kemudian apa yang menjadi tujuan semula, tidak terlaksana, dan mengacaukan semuanya, dan yang mendapatkan kerugian adalah masyarakat dan PT. Semen Indonesia Tbk. akibat ulah oknum yang tidak bisa membawa substansi ke proses yang benar.

PEMBAHASAN

Isu-Isu yang Menambah Konflik Berkembang Kerusakan Lingkungan

Ekologi menjadi faktor sangat krusial dalam usaha menolak setiap jenis pertambangan baik dalam scope nasional maupun nasional. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, eksploitasi alam dalam skala besar sangat tidak diperbolehkan, dalam dunia manapun, dikarenakan alam adalah tiang utama dalam ekosistem kehidupan manusia. Jika alam rusak atau hilang maka ekosistem kehidupan akan berjalan tidak semestinya, dan bahkan tidak dikatakan lagi sebagai sebuah ekosistem karena satu struktur ekosistem sudah tidak ada.

Alam disebut sebagai kekuatan terkuat sebagai penopang sistem kehidupan dunia. Maka untuk tetap menjadi keberlanjutan sebuah ekosistem, alam harus tetap ada, dan dilestarikan selama lamanya. Dengan kata lain jika alam

semakin rusak, maka semakin mempercepat kehidupan dunia menuju jurang kehancuran. Seperti halnya sebuah sistem manusia dalam wilayahnya, dimana Negara menjadi tiang utamanya, yang menopang segala subsistem yang berada dibawahnya, harus tetap kuat dan harus sangat kuat jika misalkan dari subsistem tidak berada pada jalan sesuai Negara. Jika Negara lemah, maka sistem akan rusak dan ataupun hilang, dan kehidupan tidak integritas lagi, karena subsistem akan berjalan sendiri sendiri.

Bagi manusia yang merupakan subsistem dari kehidupan, tentu sangat memahami tentang keberadaan dari alam itu sendiri. Jika alam lestari, sistem akan asri, jika alam merana, sistem akan sengsara. Jika alam sengsara, manusia pun merana, jika alam musnah manusia akan punah, dan seterusnya. Untuk menjaga alam agar tetap lestari, manusia yang harus beraksi, tidak boleh berbasa basi, pada orang orang yang berniat merusak atau menghilangkan alam harus segera dihadapi.

Bagi masyarakat Desa Tegaldowo, Pegunungan Watuputih adalah sebuah perumpamaan saudara seiman sebudaya. Jalinan kekerabatan yang dibangun di antara mereka sudah ada sejak nenek moyang dahulu kala. Sistem yang dibangun sejak lama, bahkan sebelum nenek moyang perusahaan tambang lahir, mereka sudah saling terikat satu sama lain, saling memahami, bahkan saling *take and give*. Disebut oleh penggerak gerakan, Pegunungan Watuputih ibarat ibu bumi, ibu yang menelorkan segala bentuk kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, ibu yang memberikan kenyamanan bagi anak anaknya, dengan mengerami mereka dari cuaca dingin, ibu yang memelihara anak anak mereka hingga tumbuh dewasa, ibu yang memberikan mereka minum pada anak anak yang kehausan, dan ibu yang selalu mengawasi segala tingkah laku anak anaknya dengan kasih sayang, dan seterusnya.

Sepanjang sejarah masyarakat Desa Tegaldowo, Pegunungan Watuputih memang memiliki hamparan lahan yang subur, bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup, bisa memberikan cukup air karena dibawah pegunungan terdapat CAT (cekungan air tanah) yang memiliki sumber air bisa disebut tidak akan pernah habis, bisa

membantu mengurangi hawa yang dingin, dan bisa memberikan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam kesunyian.

Apa yang terjadi kemudian jika Pegunungan Watuputih tidak lagi memiliki makna sebagai ibu bumi, tidak lagi memiliki identitas dengan kekokohan sebagai sistem besar, apa yang terjadi jika Pegunungan Watuputih merana, sengsara, dikarenakan keserakahan manusia, kepentingan sesaat manusia, apakah sistem primordial akan selalu kalah oleh kepentingan kekuasaan?

Pegunungan Watuputih, seperti dijelaskan tentang makna dan nilai nilai bagi kehidupan manusia, Pegunungan Watuputih juga disebut sebagai sistem besar yang didalamnya terdapat subsistem yang saling terintegrasi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pegunungan Watuputih berubah menjadi ekosistem yang pincang sejak hadirnya perusahaan tambang dimulai tahun 1996, dan secara massif diikuti perusahaan tambang lainnya, dan dengan melakukan kegiatan penambangan dan peledakan, meskipun masih dibidang dalam skala kecil atau galian C, namun tetap saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebuah ekosistem. Dan jika proses pertambangan terus dilakukan, maka tidak mungkin subekosistem akan hilang atau punah.

Bagi masyarakat telah disebutkan bahwa ekosistem yang terjalin dengan alam Pegunungan Watuputih sudah terjalin sudah sangat lama, dan jika Pegunungan Watuputih hancur maka yang menerima dampaknya adalah masyarakat yang ada disekitarnya. Masyarakat dalam menjalankan sistemnya akan berjalan pincang, tanpa ada Pegunungan Watuputih. Subsistem yang terkena dampaknya adalah hilangnya tanaman pertanian yang merupakan komoditas jangka pendek petani untuk menopang kehidupan sehari hari, seperti jagung, yang bisa panen 2 kali dalam setahun, dan hilangnya hewan hewan ternak seperti sapi, ayam, bebek, yang membutuhkan makanan yang berasal dari sumber tanaman jagung.

Sub-ekosistem lain yang akan turut hilang adalah ekosistem gua dibawah Pegunungan Watuputih, yang kelelawar dan binatang binatang lain nyaman tinggal di habitat mereka. Ekosistem dalam gua disebut sangat membantu pertanian masyarakat desa, karena dengan adanya kelelawar yang makanan favoritnya adalah serangga, dapat membantu

petani dalam mengurangi hama serangga bagi tanaman pertanian, dan tentu saja sangat sedikit diperlukan obat obatan untuk mengusir serangga tersebut.

Air menjadi sub-ekosistem yang akan hilang dengan masifnya penambangan. Kebutuhan air bagi manusia sangat tidak bisa ditawar lagi, yang selama ini kebutuhan air diambil dari sumber yang berasal dari goa goa yang berada di bawah Pegunungan Watuputih, dan mengalir ke sumur sumur masyarakat, menjadi kebutuhan pokok sehari hari, seperti minum, mandi, dan sebagainya. Selain menjadi kebutuhan pokok sehari hari, kebutuhan air juga sangat diperlukan untuk mendukung ekosistem pertanian masyarakat.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa demi kepentingan satu sistem, mengakibatkan sistem sistem lain musnah. Demi kepentingan satu kelompok, mengakibatkan kelompok lain musnah. Demi kepentingan pertambangan ekosistem yang terbangun selama ini akan musnah, hancur.

Dampak pertambangan yang selama ini menjadi dorongan dalam memberikan argument setiap gerakan sosial adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa berasal dari suara mesin mesin tambang, mesin mesin truk pengangkut hasil tambang, suara ledakan, serta pencemaran yang berasal dari debu dan asap yang dihasilkan dari mesin mesin tersebut.

Pencemaran lingkungan bagi masyarakat Desa Tegaldowo bukan hal yang baru, karena sebelum munculnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. penduduk sudah menerima dampak lingkungan dari perusahaan tambang terdahulu. Dampak pencemaran lingkungan sangat dirasakan oleh masyarakat desa, adalah debu jalanan pada saat kendaraan pengangkut hasil tambang melintas di tengah tengah pemukiman penduduk. Debu mengepul disaat roda bergerak di atas jalan yang tidak beraspal dan hanya dilapisi struktur tanah padas, putih, di atasnya, menambah parahnya cuaca panas yang semakin menyakkan dada.

Debu dan suara yang dihasilkan dari kendaraan pengangkut hasil tambang, sangat mengurangi kenyamanan yang selama ini menjadi ciri lingkungan pedesaan. Banyak masyarakat yang tidak bisa memejamkan mata walau sejenak, akibat suara dari truk pengangkut

hasil tambang, kebisingan sangat dirasakan dengan kondisi sekarang. Dampak kebisingan yang ditimbulkan selain mengarah pada kondisi fisik, juga menimbulkan kebisingan mental, yang belum sangat diterima oleh masyarakat di Desa Tegaldowo. Mereka membayangkan jika seandainya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. benar benar hadir dan beroperasi di desa mereka, malapetaka kebisingan yang akan terjadi.

HAM dan Demokrasi

Faktor lain yang mendorong gerakan adalah perlindungan akan hak hak asasi dalam berdemokrasi, hak berbicara, hak mengemukakan pendapat, hak persamaan di antara yang lain, diatur dalam perundang undangan. Didalam sebuah Negara dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memiliki asas (1) Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia, (2) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. (Suyahmo :2015). Selain dapat menguatkan Negara demokrasi, gerakan sosial meningkatkan ikatan solidaritas organisasi yang tergabung didalamnya. Ornop yang ikut tergabung dalam gerakan meliputi LSM, LBH, YLBHI, KOMNAS HAM. Dalam gelombang gerakan sosial selanjutnya peran ornop sangat berperan dalam membantu setiap aksi, menjadikan gerakan sosial semakin kuat dan berlangsung sangat lama.

Pada kasus gerakan masyarakat Desa Tegaldowo, membuktikan tentang perlindungan hak hak asasi manusia selama ini belum terlihat didalam sebuah pemerintahan demokrasi. Hak mendapatkan keadilan, hak memperoleh kebenaran informasi belum terwujud. Justru yang terjadi adalah perwujudan kekuatan otoritas mereka yang sewenang wenang sebagai sistem yang memaksa terhadap *wong ndeso* yang dengan segala kekurangannya.

Mereka juga senantiasa melakukan hal hal dengan dasar legitimasi kekuasaan untuk melanggengkan budaya superior mereka. Budaya tidak peduli dengan masyarakat yang kritis, budaya mendiskriminasi subsistem, karena menurut pandangan mereka adalah ethnosentrism. Mereka sengaja *memiringkan, menyeringai*, terhadap pandangan berbeda, yang menurut mereka disebut *mengada ada*, tidak *sendiko dhawuh*.

Mereka melupakan bahwa perkembangan zaman sudah bergerak sangat cepat, perkembangan pola pikir masyarakat sudah meningkat, dimana demokrasi menjadi milik masyarakat seutuhnya. Dan harusnya mereka justru menjadi juru kunci bagi pelaksanaan kelangsungan demokrasi, berhasil atau tidaknya sebuah Negara demokrasi dapat diketahui dari seberapa jauh dari masyarakat dapat berkontribusi dalam setiap pembangunan Negara.

Model pembangunan harusnya tidak lagi dari *up to bottom*, isu sentralistik, pada pembangunan tertentu perlu model *bottom up*, partisipasi masyarakat menjadi ukuran, baik dari segi ekonomi, sosial budaya. Masyarakat Desa Tegaldowo selama ini memiliki sumber penghasilan yang mencukupi, dan dari pertanian mereka sudah sangat bisa untuk kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga.

Model pembangunan sentralisasi hendaknya harus dirubah dengan model desentralisasi, di mana tujuan pembangunan sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan, dan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu harusnya ada perubahan paradigm dari *power centered* menjadi *society centered*. Untuk menjadikan paradigm *society centered*, sangat diperlukan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat, sebagaimana prinsip dasar dari sebuah Negara demokrasi.

Sejak era reformasi bergulir hingga sekarang menciptakan sebuah sistem demokrasi yang semakin berkembang dari tahun ketahun, seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Kesadaran akan tugas, kewajiban, dan fungsi sebagai masyarakat, yang harus melawan pada hal hal yang bertentangan dengan asas dan prinsip prinsip kebenaran, kesejahteraan, dan ketidakadilan.

Reformasi memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Negara demokrasi, dengan membuka cakrawala pemikiran pemikiran baru bagi masyarakat bawah atau masyarakat pedesaan, mulai menyadari tentang pentingnya memperjuangkan hak hak asasi mereka, hak hak hidup, hak hak memperoleh keterbukaan, hak hak keadilan, baik dalam hukum rakyat maupun dalam forum diskusi.

Reformasi juga menghilangkan demokrasi yang disebabkan oleh ketakutan karena pengaruh otoritas sebuah sistem dengan menggunakan

sarana alat keamanan, dan menggunakan legitimasi kekuasaan politik untuk menghapus segala bentuk inspirasi dan aspirasi dari masyarakat bawah, membungkam bentuk kritik dari masyarakat yang selama ini masih terjadi di sebagian wilayah di Negara ini. Salah satu bukti bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyeimbangi pemikiran-pemikiran yang muncul dan berkembang di era sekarang, dan justru masih cenderung kolot dan tradisionalistik.

Demokrasi juga mengembangbiakkan masyarakat terbuka dari masyarakat tertutup, dengan menggeser budaya ethnosentrisme menjadi budaya penuh keterbukaan, mengembangkan pemikiran dan menyumbangkan buah pemikiran yang nantinya dapat memberikan kritik dan juga bisa menerima kritik. Pemerintah daerah dalam kasus ini seolah tidak merepresentasikan upaya memiliki pemikiran terbuka yang selama ini menjadi paradigma dalam demokrasi, bukan merasa bangga memiliki masyarakat yang sudah bergerak maju dari mereka, malah justru mengatakan hal-hal yang mengatasnamakan simbol kekuasaan mereka. Ironi dan tragis bisa disebut demikian, karena fakta tidak akan bisa di pungkiri dan tidak bisa diingkari, sekalipun mata mereka terpejam, namun bayangan mereka tidak akan pernah setuju dengan mata terpejam, justru semakin susah untuk di lupakan.

Dinamika Konflik

Dinamika konflik memiliki fungsi untuk menjelaskan tentang alur dari awal konflik hingga konflik masih berlangsung hingga sekarang. Konflik pertambangan pabrik semen di Rembang menciptakan dua jenis konflik, yaitu konflik tertutup dan konflik terbuka. Konflik tertutup terjadi sebelum masuknya perusahaan tambang skala besar yaitu pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. yaitu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang dalam skala kecil atau galian C, yang sudah mulai ada sejak tahun 1995.

Konflik tertutup merupakan ciri khas dari masyarakat pedesaan, yang memilih untuk menyembunyikan sebab-sebab konflik, dikarenakan faktor budaya dan norma yang masih melekat dalam prinsip hidup mereka. Konflik menjadi terbuka dan terang-terangan membuka pengetahuan masyarakat karena kondisi yang

semakin semrawut dan tidak sesuai dengan harapan mereka.

Bermula konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan pengelola tambang skala kecil atau Pertambangan Galian C, dengan menyerobot lahan milik warga dengan menggunakan alat berat untuk memuluskan akses jalan menuju tambang. Konflik berlanjut dengan aktor yang berkepentingan dalam jual-beli tanah, berkelompok dengan aktor yang memiliki kewenangan dalam tingkat lokal, menyudutkan masyarakat yang selama ini menjadi korban semakin terpojok dan tidak bisa berbuat apapun. Konflik pertanahan berkembang menjadi konflik berkepentingan, baik dari aktor lain maupun dengan aktor yang berwenang dalam membuat kebijakan di tingkat lokal.

Semenjak terdengar pabrik semen berencana untuk mendirikan perusahaan tambang skala besar di sekitar wilayah mereka, mereka sudah memiliki *ancang-ancang* tentang apa yang akan dilakukan demi kepentingan kantong mereka. Konflik pertanahan semakin sengit dan rawan di karenakan melambungkannya harga tanah. Daya jual-beli naik 1000 x lipat, sangat menguntungkan mendengar kata milyaran dari per hektar lahan. Aktor konflik semakin berkembang, di tambah dengan tengkulak tanah dan makelar tanah. Konflik dengan aktor yang memiliki kewenangan kebijakan bukan hanya tingkat lokal, namun sudah berkembang menuju tingkat daerah.

Bentuk konflik yang sebelumnya di sembunyikan, sekarang berubah menjadi konflik terbuka dan terang-terangan. Dendam yang bersemayam selama puluhan tahun muncul ke permukaan, semburannya begitu kuat menambah daya gedor dan semangat bagi masyarakat yang dulu menjadi korban. Bergabung bersama dengan masyarakat lain yang memiliki kepedulian akan lingkungan, dari yang selama ini menjadi pengetahuan tentang kebenaran akan adanya pabrik tambang. Konflik semakin berkembang dari ruang lingkup hanya lokal menjadi lingkup nasional, di karenakan banyak kelompok yang ikut nimbrung dan masing-masing membawa kepentingan kelompoknya. Konflik kepentingan dari masing-masing aktor membuat konflik semakin melebar dan tidak selesai hingga sekarang.

Dinamika konflik yang terjadi di Rembang dalam kasus pertambangan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. belum mengarah kepada tujuan akhir yaitu penyelesaian konflik. Di karenakan masing masing pihak atau aktor yang berkonflik masih kokoh terhadap tujuan dan belum menemukan titik temu. Suharko (2016), Upaya masyarakat adat Sedulur Sikep yang menuntut keterlibatan Lembaga Kepresidenan telah membuka peluang untuk penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi. Presiden telah memutuskan untuk melakukan KLHS terhadap ekosistem Pegunungan Kendeng Utara sebelum dilakukan eksploitasi batu kapur untuk pabrik semen. Dalam jangka pendek, keputusan Presiden tersebut bisa meredakan konflik. Selanjutnya, hasil KLHS akan menjadi rujukan bagi upaya mediasi oleh pihak ketiga (terutama Presiden atau Pemerintah Pusat) untuk menyelesaikan konflik ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Konflik pabrik semen di Rembang pada dasarnya bukanlah murni konflik antara PT. Semen Indonesia Tbk. dengan masyarakat lokal, namun konflik telah berlangsung sekian lama semenjak perusahaan tambang kecil berdiri dari 20 tahun yang lalu. Konflik masyarakat lokal dengan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. adalah bentuk konflik baru yang merupakan serangkaian konflik yang menyambung antara perusahaan pertambangan yang lalu dengan perusahaan pertambangan yang lebih besar yaitu PT. Semen Indonesia Tbk. Akar konflik sangat perlu di pahami sebagai modal sosial agar interaksi sosial berjalan dengan maksimal dan keberlanjutan. Jangan jadi konflik menjadi *kasep* sehingga sulit di cari titik temu. Akar konflik menjadi penentu dalam setiap upaya pembangunan, karena dengan memahami kondisi lingkungan sosial budaya menjadi strategi adaptasi pengenalan hal baru yang lebih humanis, dan jika tidak maka konflik akan berkembang ke aras nilai, pertentangan prinsip-prinsip dalam budaya asli beerlawanan dengan budaya baru sehingga konflik sulit terselesaikan. Persoalan yang sering kali terjadi dalam setiap kegiatan pertambangan adalah proses pemahaman awal tentang kondisi sosial budaya masyarakat lokal

tidak menjadi penting dikarenakan lebih dominan pada targetisasi bisnis, instan dan berada dalam konteks percepatan pembangunan. Pentingnya memahami akar konflik sama pentingnya memahami kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Harusnya proses adaptasi menjadi proses yang sangat di utamakan, karena proses awal yang baik sangat menjamin akhir yang baik.

Dalam kasus akar konflik pabrik semen Rembang, baik dari pihak perusahaan tambang skala kecil atau Galian C, dengan PT. Semen Indonesia Tbk. memiliki kesamaan dalam hal strategi pembebasan lahan yaitu menggunakan agen makelar yang sama dengan agen masa lalu yang telah di lakukan oleh perusahaan tambang sebelumnya, dengan cara cara yang tidak etis dan diskriminatif. Hendaknya PT. Semen Indonesia Tbk. sangat menghindari agen yang pada akhirnya tidak mendukung keberadaan pabrik semen, dan berpihak kepada masyarakat yang selama ini menjadi korban. Berdasarkan uraian singkat tentang hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa ada dua point yang terkait dengan pendidikan konflik dan agent yang konflik. Pertama; Pendidikan konflik merupakan konsep kolaborasi antara pendidikan dalam deskripsi UNESCO dengan pemetaan konflik (*conflict mapping*) yang di jelaskan oleh Wehr dan Bartos. Kontribusi pemetaan konflik dalam *learning to know* dapat di deskripsikan dengan (1) memahami konteks konflik, (2) memahami aktor konflik, (3) memahami sebab-sebab konflik, (4) memahami tujuan konflik, (5) memahami dinamika konflik, dan (6) memahami konflik sebagai suatu hal yang positif, dan (7) memahami nilai-nilai konflik.

Pemahaman konflik (*learning to know of conflict*) merupakan mekanisme awal dari konsep pendidikan konflik, berdasarkan konsep pendidikan UNESCO, bahwa tahapan proses pendidikan di mulai dari *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Pemahaman konflik (*learning to know of conflict*) dalam kasus Semen Rembang dengan menggunakan teori pemetaan konflik yang di kemukakan oleh Wehr dan Bartos. Kedua, berdasarkan uraian tentang agen konflik, sangat perlu *mengutus* agen-agen yang harus bisa menjaga keseimbangan system yang telah di bangun sebelumnya. Dengan kata lain tugas seorang agen harus berdiri di tengah-tengah

kondisi di antara keduanya. Agen harus bisa menjadi *safety valve* (katup penyelamat) yang harus memiliki keahlian (1) berdiri di tengah netral, mengupayakan kedua belah pihak yang berkonflik agar bisa mencapai titik temu, kesepakatan sintesis, (2) mengupayakan kedua belah pihak tidak di rendahkan harkat dan martabatnya dan harga dirinya, (3) mengupayakan kedua belah pihak merasa diuntungkan, sama-sama memperoleh keuntungan dan tidak ada yang di rugikan, (4) mengupayakan kedua belah pihak agar menyadari bahwa hidup itu dinamis, penuh tantangan dan jangan meninggalkan kebersamaan dan kerukunan sebagai penyangga kehidupan sosial.

SARAN

Hendaknya baik pemerintah maupun korporasi menerapkan sosialisasi *asor* ala Sunan Kalijaga yang inklusif dan membaur dengan masyarakat (*egaliter*), untuk memahami keluhan-keluhan dialami oleh masyarakat. Musyawarah untuk mufakat yang bersumber pada nilai-nilai Jawa harus menjadi *keeping touch* bagi kedamaian dalam kebersamaan dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coser, Lewis. 1964. *The Function Of social conflict*. New York: The Press, A Division of McMillan Publishing, Co. Inc
- Kartodirjo, S. 1984. *Pemberotakan Petani Banten*. Jakarta, Pustaka Jaya
- Manalu, Dimpos. 2006. *Gerakan Sosial Dan Kebijakan Publik :: Studi Terhadap Gerakan Perlawanan Masyarakat Dalam Mengubah Kebijakan Pemerintah Mengenai PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea Sumatera Utara*. Tesis UGM di Terbitkan.
- Ngadisah, 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Prasetyantoko, A. et.al. (Eds)/2012. *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES dan Prakarsa
- Pruit & Rubbin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta
- Rachman, M. 2015. *Lima Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta, Magnum Press.
- Silaen Victor, 2006. *Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal Pada Kasus Indranayon Di Toba Samosir*. Jogjakarta: IRE Press.
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Rajawali Press
- Soetomo. Drs. 1995. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Press
- Suharko, 2013a. *Karst: Di Tambang atau di Lestarikan, Konflik Sosial Rencana Pembangunan Semen di Pati Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Vol 17, no 2, (101-206).
- Suharko, 2016b. *Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016*. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Volume 20, Nomor 2, November 2016 (97-116)
- Suharko. (2004). "Negara, Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil: Studi Kasus Konflik Inti Indorayon Utama", chapter buku dalam Lambang Trijono et.al. (Eds), *Potret Retak Nusantara, Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPS (PSKP) UGM books
- Suyahmo. 2014. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Magnum Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Nazar Nurdin. 2015. *ESDM: Lokasi Penambangan Pabrik Semen di Rembang Bukan Kawasan Hutan Lindung*. (Kompas, 26 Februari 2015).

Dokumen Negara

- UU 1945 Pasal 3 ayat 28 huruf E Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
- Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Republik Indonesia. *Nomor:12 Tahun 2012*. Tentang. Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah replaced UU Nomor 32 Tahun 2004

Royce W 2014 *Warga Rembang Dukung Pabrik Semen*. Semarang Metro

Artikel Surat Kabar

.....2014. *Enam LSM Dukung Pendirian Pabrik Semen*. Tribun Rembang. Rembang

Ainur R 2012 *Pabrik Semen Gresik Dongkrak PAD Rembang*. Suara Merdeka. Gresik

Irsyam F 2014 *KAS Tolak Pembangunan Pabrik Semen di Rembang*. Suara Merdeka. Semarang

Puji U 2014 *Dinilai Bermanfaat, Warga Rembang Demo Dukung Pabrik Semen*. Kompas Semarang

Royce W 2014 *Pabrik Semen di Rembang Mengancam Mata Pencaharian Warga*. Suara Merdeka, Semarang